



PENGARUH KEMISKINAN, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DI JAWA TENGAH TAHUN 2006-2009

Denni Sulistio Mirza ✉

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima September 2012
Disetujui September 2012
Dipublikasikan November 2012

Keywords:
Indeks Pembangunan Manusia, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal.

Abstrak

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu tolok ukurnya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2006-2009 dan menganalisis seberapa besar pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah.

Hasil penelitian menunjukkan perkembangan IPM mengalami peningkatan dengan kategori IPM menengah selama periode tahun 2006-2009 hingga mampu mencapai target IPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan hasil regresi panel menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM dan Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Kesimpulannya bahwa perkembangan IPM mengalami peningkatan selama tahun 2006-2009, kemiskinan berpengaruh negatif, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif. Melalui penelitian ini disarankan agar dalam merencanakan kebijakan pemerintah tidak hanya melihat dari pencapaian target peningkatan pertumbuhan ekonomi saja namun juga target peningkatan pembangunan manusia karena pertumbuhan ekonomi sendiri belum memadai untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat.

Abstract

✉ Alamat korespondensi:
Gedung C6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: edaj_unnes@yahoo.com

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia bahwa diantaranya yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran utama bagi negara-negara sedang berkembang. Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga dengan semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli). Melalui peningkatan ketiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografi serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolak ukur utama dalam menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Menurut *Human Development Report 2007-2008*, IPM Indonesia sebesar 0,728 pada tahun 2007 dan berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang disurvei oleh UNDP. Indeks GDP In-

donesia berdasarkan *Purchasing Power Parity (PPP)* mencapai 0,609 dengan nominalnya sebesar US\$ 3.843. Semakin baik angka *PPP* mendekati 1 maka kemampuan daya beli masyarakat semakin baik dan begitu pula sebaliknya. Angka harapan hidup orang Indonesia mencapai 69,7 tahun, atau dinyatakan dalam indeks harapan hidup mencapai 0,745. Indeks pendidikan mencapai 0,83 dengan angka melek huruf sebesar 90,4% dan rata-rata rasio masuk sekolah dari SD sampai SMU mencapai 68,2%.

Lanjouw dalam Ginting, et al (2008) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena aset utama penduduk miskin adalah tenaga kasar mereka. Tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktifitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan manusia belum secara optimal dilakukan karena hanya terfokus pada pengurangan kemiskinan,

Jawa tengah memiliki laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,67% per tahun. Dengan demikian memiliki potensi sumber daya manusia yang siap untuk diberdayakan. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan daerah secara lebih mandiri. Berdasarkan visi, misi dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah selama periode 2008 – 2013 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” ditetapkanlah target untuk beberapa indikator utama pembangunan sebagai sasaran yang ingin dicapai antara lain yaitu dengan mengukur target pencapaian Indeks Pembangunan Manusia tahun 2009-2013 yang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1 Target Capaian IPM Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

No.	Tahun	Umur Harapan Hidup (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Angka Melek Huruf (%)	Pengeluaran Riil/Kapita (Rp. 000)
1	2009	72,6	6,9	95,6	624,2
2	2010	72,9	6,9	96,1	624,8
3	2011	73,2	7,0	96,6	625,3
4	2012	73,5	7,0	97,0	625,8
5	2013	73,8	7,0	97,3	626,2

Sumber : Bappeda Jateng, 2009 diolah.

Target capaian IPM di Jawa Tengah hingga tahun 2013 di harapkan mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 74,3% dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 73,8 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,0 tahun, angka melek huruf sebesar 97,3 %, dan pengeluaran perkapita sebesar Rp. 626.200. Hal ini menjadi sebuah target guna menjadikan Jawa Tengah mampu untuk bersaing dengan daerah lain khususnya di pulau Jawa dan di luar pulau

Jawa pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing dalam hal kualitas sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator dalam mencapai pembangunan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan meminimalisasi dari kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2008 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Urutan Peringkat Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Di Jawa Tengah tahun 2008

No.	Kabupaten/Kota	IPM	No.	Kabupaten/Kota	IPM
1	Kota Surakarta	77,2	19	Kab. Rembang	71,1
2	Kota Semarang	76,5	20	Kab. Cilacap	70,9
3	Kota Magelang	76,1	21	Kab. Purbalingga	70,9
4	Kota Salatiga	75,8	22	Kab. Wonogiri	70,5
5	Kota Pekalongan	73,5	23	Kab. Pekalongan	70,3
6	Kab. Temanggung	73,4	24	Kab. Kebumen	70,2
7	Kab. Semarang	73,3	25	Kab. Grobogan	70,2
8	Kota Tegal	73,2	26	Kab. Boyolali	70,0
9	Kab. Sukoharjo	73,0	27	Kab. Sragen	69,6
10	Kab. Klaten	72,9	28	Kab. Blora	69,6
11	Kab. Pati	72,3	29	Kab. Wonosobo	69,5
12	Kab. Karanganyar	72,2	30	Kab. Tegal	69,5
13	Kab. Kudus	72,0	31	Kab. Kendal	69,4
14	Kab. Jepara	71,9	32	Kab. Batang	69,2
15	Kab. Banyumas	71,8	33	Kab. Banjarnegara	69,0
16	Kab. Demak	71,6	34	Kab. Pemalang	68,4
17	Kab. Magelang	71,4	35	Kab. Brebes	67,1
18	Kab. Purworejo	71,3		Jawa Tengah	71,6

Sumber : BPS, Jawa Tengah dalam angka 2009.

Pada Tabel 2 di atas dijelaskan bahwa keseluruhan besarnya nilai IPM di Jawa Tengah tahun 2008 sebesar 71,6 sudah mendekati target capaian IPM Jawa Tengah tahun 2009 yaitu sebesar 72,6 (Tabel 1). Pada tahun 2008, IPM tertinggi terdapat di Kota Surakarta yaitu sebesar 77,2 sedangkan IPM terendah terdapat di Kabupaten Brebes yaitu sebesar 67,1. Hal ini merupakan sebuah disparitas dalam pencapaian IPM karena adanya perbedaan kualitas sumber daya manusia juga sarana prasarana baik dibidang pendidikan, kesehatan maupun yang lain sebagai indikator

IPM.

Perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dari tahun ke tahun berfluktuatif sehingga diperlukan beberapa program guna meminimalisasi tingkat fluktuasinya dan dengan demikian pembangunan manusia dapat lebih stabil. Kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang kompleks yang sebenarnya bermula dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidi-

kan dan kesehatan pun terabaikan. Hal tersebut menjadikan gap pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh peme-

Tabel 3

Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 1996-2008

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
1996	1.973,4	4.444,2	6.417,6	20,67	22,05	42,72
1999	3.062,2	5.723,2	8.755,4	27,80	28,05	55,85
2002	2.762,3	4.546,0	7.308,3	20,50	24,96	45,46
2003	2.520,3	4.459,7	6.980,0	19,66	23,19	42,85
2004	2.346,5	4.497,3	6.843,8	17,52	23,64	41,16
2005	2.671,2	3.862,3	6.533,5	17,24	23,57	40,81
2006	2.958,1	4.142,5	7.100,6	18,90	25,28	44,18
2007	2.687,3	3.869,9	6.557,2	17,23	23,45	40,68
2008	2.556,5	3.633,1	6.189,6	16,34	21,96	38,30

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, diolah. 2009

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peran pemerintah dalam kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pada hakekatnya pembangunan adalah pembangunan manusia, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto dalam Christy et al, 2009). Melihat fenomena di atas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu:

rintah menjadi tidak terealisasi dengan baik. Adapun perkembangan penduduk miskin di Jawa Tengah dapat dilihat dari tabel berikut ini:

(1) lamanya hidup yang diukur dengan harapan hidup pada saat lahir; (2) tingkat pendidikan, yang diukur dengan kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk dewasa (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga); dan (3) tingkat kehidupan yang layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (PPP Rupiah). Indeks ini pertama kali dikembangkan pada 1990 oleh ekonom Pakistan bernama Mahbub ul Haq. Formula penghitungan IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = (\text{Indeks} + \text{Indeks} + \text{Indeks})$$

Dimana :

- = lamanya hidup
- = tingkat pendidikan
- = tingkat kehidupan yang layak

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen dari setiap indeksnya harus dihitung terlebih dahulu dengan formula perhitungan sebagai berikut:

Indeks =

Dimana :

- = indikator ke i dari daerah j
- = nilai minimum dari xi
- = nilai maksimum dari xi

Nilai minimum dan maksimum dari setiap komponen IPM adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator Komponen	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	25	85	Sesuai standar global (UNDP)
Angka Melek Huruf	0	100	Sesuai standar global (UNDP)
Rata-rata Lama Sekolah	0	15	Sesuai standar global (UNDP)
Konsumsi per kapita yang disesuaikan 2005	300.000	732.720	UNDP menggunakan pendekatan perkapita riil yang disesuaikan

Sumber : BPS, Bappenas, UNDP (2004)

Catatan :

Proyeksi pengeluaran riil/unit/tahun untuk propinsi yang memiliki angka tertinggi (Jakarta) pada tahun 2018 setelah disesuaikan dengan formula Atkinson. Proyeksi mengasumsikan kenaikan 6,5 persen per tahun selama kurun 1996-2018.

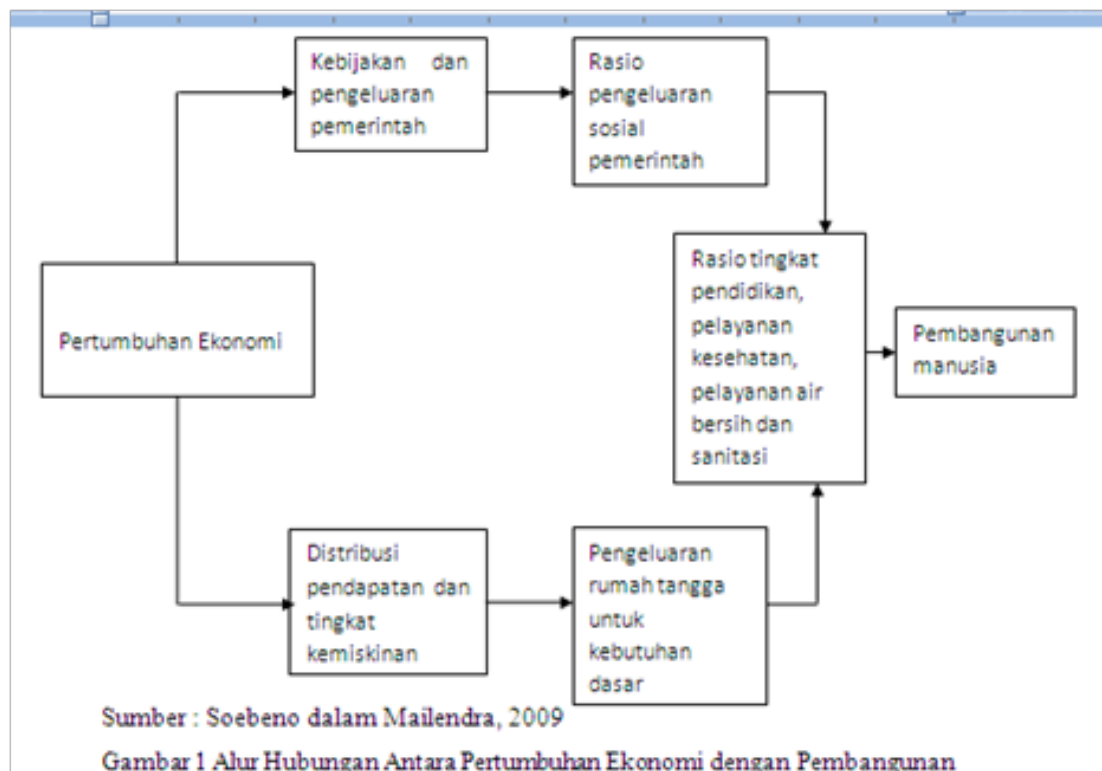
Setara dengan dua kali garis kemiskinan untuk propinsi yang memiliki angka terendah tahun 1996 di Papua.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan modal manusia yang berkualitas, kinerja ekonomi diyakini juga akan

lebih baik, sesuai dengan yang dikatakan Mubarto dalam Mailendra (2009) "*social development is economic development*". Menurut Todaro (1998), sumber daya manusia dari suatu bangsa merupakan faktor paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi dari bangsa yang bersangkutan.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dijelaskan melalui 2 (dua) jalur seperti yang digambarkan pada Gambar 1. Jalur pertama adalah melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk subsektor sosial yang terangkum dalam belanja modal. Besarnya pengeluaran tersebut mengindikasikan besarnya peran pemerintah terhadap pembangunan manusia.



Kemiskinan

Chamber yang dikutip dalam Suradi (2007) mendefinisikan kemiskinan sebagai "... suatu keadaan melarat dan ketidakberuntungan, suatu keadaan minus (*deprivation*)", bila dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan "minimnya pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan". Kemudian oleh Amartya Sen dalam Suradi (2007) mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam mendidik anak-anak (pendidikan) serta merawat kesehatan anak-anak.

Garis kemiskinan absolut sangat penting untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan terbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolute yang sama digunakan di kedua negara tersebut. Bank Dunia memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh Bank Dunia, yaitu : a) US \$ 1 perkapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP (*Purchasing Power Parity*), bukan nilai tukar resmi (*exchange rate*). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut (BPS Jateng, 2008).

Belanja Modal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sarana atau alat untuk dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti tanggung jawab Pemerintah Daerah karena APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka.

tan yang meliputi belanja rutin (operasional) dan belanja pembangunan (belanja modal) serta pengeluaran tidak tersangka.

Peran Belanja Modal Dalam Struktur Anggaran Daerah

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU 32/2004). Kewajiban daerah tersebut tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain dan membeli. Namun biasanya cara yang dilakukan dalam pemerintahan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

METODA PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan badan pusat statistik (BPS Jateng) khususnya data tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Data yang diteliti meliputi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, realisasi belanja modal, dan Indeks Pembangunan Manusia. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan *time series* dan *cross section*. Data *time series* periode tahun 2006 – 2009 sedangkan data *cross section* adalah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Populasi Penelitian

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut studi populasi atau studi sensus (Arikunto, 2002). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah

kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 35 kabupaten/kota. Dalam penelitian ini menggunakan seluruh obyek penelitian yang diambil dari populasi yang meliputi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel terikat (*dependent variabel*) sedangkan variabel bebasnya (*independent variabel*) adalah kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal.

Adapun definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu : (1) Indeks Harapan Hidup, yang diukur dengan angka harapan ketika lahir; (2) Indeks Pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; (3) Indeks Pendapatan, yang diukur dengan daya beli konsumsi per kapita.

Kemiskinan dapat dilihat melalui penduduk yang secara ekonomi tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan setara 2100 kalori dan kebutuhan non makanan yang mendasar. Dalam penelitian ini menggunakan persentase penduduk miskin yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Pertumbuhan ekonomi adalah persentase dari sebuah nilai yang dapat dilihat dari PDRB yang dijadikan sebagai tolak ukur peningkatan perekonomian negara. Dalam penelitian ini digunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2000.

Belanja modal ialah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat atau disebut juga belanja pembangunan yang berupa pembangunan investasi fisik (pembangunan infrastruktur) yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan mengakibatkan terjadinya penambahan aset daerah.

Analisis Panel Data

Menurut Gujarati (2004), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu, sedangkan data *time series* merupakan

data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan analisis empirik dengan perilaku data yang lebih dinamis.

Ada 3 teknik pendekatan mendasar yang digunakan dalam menganalisis panel data:

Model Pooled Least Square (*Common Effect*)

Model ini dikenal dengan estimasi *Common Effect* yaitu teknik regresi yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel dengan cara hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Model ini hanya menggabungkan kedua data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu sehingga dapat dikatakan bahwa model ini sama halnya dengan metode OLS (*Ordinary Least Square*) karena menggunakan kuadrat kecil biasa. Dalam pendekatan ini hanya mengasumsikan bahwa perilaku data antar ruang sama dalam berbagai kurun waktu. Pada beberapa penelitian data panel, model ini seringkali tidak pernah digunakan sebagai estimasi utama karena sifat dari model ini yang tidak membedakan perilaku data sehingga memungkinkan terjadinya bias, namun model ini digunakan sebagai pembandingan dari kedua pemilihan model lainnya.

Model Pendekatan Efek Tetap (*Fixed Effect*)

Pendekatan model ini menggunakan variabel boneka yang dikenal dengan sebutan model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variabel* atau disebut juga *Covariance Model*.

Pada metode *Fixed Effect*, estimasi dapat dilakukan dengan tanpa pembobot (*no weighted*) atau *Least Square Dummy Variabel* (LSDV) dan dengan pembobot (*cross section weight*) atau *General Least Square* (GLS). Tujuan dilakukannya pembobotan adalah untuk mengurangi heterogenitas antar unit *cross section* (Gujarati, 2004). Penggunaan model ini tepat untuk melihat perubahan perilaku data dari masing-masing variabel sehingga data lebih dinamis dalam mengintrepetasi data. Pemilihan model antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* dapat dilakukan dengan pengujian *Likelihood Test Ratio* dengan ketentuan apabila nilai probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan alpha maka dapat diambil keputusan menggunakan *Fixed Effect Model*.

Model Pendekatan Efek Acak (*Random Effect*)

Model data panel pendekatan ketiga yaitu model efek acak (*random effect*). Dalam model efek acak, parameter-parameter yang berbeda antar daerah maupun antar waktu dimasukkan ke

dalam *error*. Karena hal inilah, model efek acak juga disebut model komponen *error* (*error component model*).

Dengan menggunakan model efek acak ini, maka dapat menghemat pemakaian derajat kebebasan dan tidak mengurangi jumlahnya seperti yang dilakukan pada model efek tetap. Hal ini berimplikasi parameter yang merupakan hasil estimasi akan menjadi semakin efisien. Keputusan penggunaan model efek tetap atau pun acak ditentukan dengan menggunakan Uji *Hausman* dengan ketentuan apabila probabilitas yang dihasilkan signifikan dengan α maka dapat digunakan metode *Fixed Effect*, namun apabila sebaliknya maka dapat memilih salah satu yang terbaik antara model *Fixed Effect* dengan *Random Effect*.

Spesifikasi Model Regresi Data Panel

Perumusan model penelitian hubungan antara variabel makroekonomi dan kebijakan pemerintah daerah terhadap pembangunan manusia didasarkan pada alur hubungan yang dijelaskan pada tinjauan pustaka dan tergambar pada Gambar 2.1. Berdasarkan penelitian dan kerangka pemikiran sebelumnya, maka analisis data dibatasi pada empat variabel, yaitu variabel pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT), realisasi belanja modal daerah (lnBMOD).

Secara ekonometrika, hubungan antara kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di Propinsi Jawa Tengah dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan berikut ini :

$$IPM_{it} = a_i + B1 KMS_{it} + B2 GRWT_{it} + B3 lnBMOD_{it} + u_{it}$$

Dimana :

IPM = indeks pembangunan manusia

KMS = tingkat kemiskinan (persen)

GRWT = pertumbuhan ekonomi (persen)

lnBMOD = realisasi belanja modal (ru-

piah)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi

Untuk melihat seberapa besar kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah, maka terlebih dahulu dilakukan penaksiran model. Pengujian yang dilakukan meliputi *likelihood test ratio* untuk memilih antara model *common effect* dengan *fixed effect* serta *hausman test* untuk memilih antara model *fixed effect* dengan *random effect*. Berikut ini adalah hasil penaksiran model yang telah di ujikan dengan menggunakan software EViews 6 yang meliputi :

Redundant Fixed Effect - Likelihood Ratio

Pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model terbaik antara model *common effect model* dengan *fixed effect model* adalah dengan uji *Likelihood Ratio*. Hasil uji selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai probabilitas *Cross-section Chi-square* sebesar 0,0000 dan signifikan terhadap α 5% sehingga dapat diputuskan bahwa model yang dipilih menggunakan *fixed effect*.

Correlated Fixed Effect - Hausman Test

Pengujian yang dapat dilakukan untuk memilih model yang terbaik antara *fixed effect model* dengan *random effect model* adalah dengan uji *Hausman*. Hasil uji selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa probabilitas *Cross-section random* sebesar 0,4879 dan tidak signifikan dengan α 5% sehingga dapat diputuskan model yang dipilih adalah menggunakan *fixed effect*.

Selain serangkain uji tersebut, pemilihan model juga dilakukan dengan melihat uji *godness fitnya*. Uji *goodness of fit* selengkapnya disajikan dalam tabel berikut

Tabel 5 Output pengaruh kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah Tahun 2006-2009

No.	Dependent Variabel: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Model		
		<i>Common</i>	<i>Fixed Effect</i>	<i>Random Effect</i>
1	Konstanta		71,31758	71,75510
	Std Error	-	1,561844	1,544767
	Prob		0,0000*	0,0000*
2	Kemiskinan (KMS)	-0,251349	-0,208192	-0,215131
	Std Error	0,038239	0,018047	0,016686
	Prob	0,0000*	0,0000*	0,0000*
3	Pertumbuhan Ekonomi (GRWT)	0,212240	0,153434	0,154546
	Std Error	0,321542	0,069638	0,068635
	Prob	0,5103*	0,0298*	0,0259*
4	Belanja Modal (lnBMOD)	6,415725	0,274209	0,247472
	Std Error	0,146418	0,121157	0,119650
	Prob	0,0000*	0,0257*	0,0405*
5	R ²	0,560559	0,980470	0,632023
6	Adj R ²	-0,583341	0,973385	0,623906
7	F	-	138,3960	77,86273
	Prob F		0,000000*	0,000000*
8	Durbin Watson	0,725264	1,305490	0,989512

Ket: * Signifikan pada $\alpha=5\%$

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan *goodness of fit*-nya maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi pengaruh kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah adalah model *fixed effect*.

Uji Signifikansi Bersama-sama (Uji statistik F)

Uji F dimaksudkan untuk melihat ada tidaknya pengaruh bersama-sama yaitu kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT), dan belanja modal (lnBMOD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan hasil regresi dari pengaruh kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT), dan belanja modal (lnBMOD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009 yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 model

fixed effect diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 138,3960 dengan probabilitas 0,000000. Hasil F_{tabel} dengan df *numerator* 3 dan *denominator* 137 diperoleh F_{tabel} sebesar 2,67. $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel independen kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji Statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut disajikan tabel Uji statistik t pengaruh kemiskinan (KMS), pertumbuhan ekonomi (GRWT) dan belanja modal (lnBMOD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Jawa Tengah tahun 2006-2009.

Tabel 6 Uji Statistik t

Variabel	t hitung		t tabel $\alpha=0,05$
	t hitung	Prob	
Kemiskinan (KMS)	-11.53634	0,0000	1.65613
Pertumbuhan ekonomi (GRWT)	2.203303	0,0298	1.65613
Belanja modal (lnBMOD)	2.263245	0,0257	1.65613

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa t hitung untuk variabel kemiskinan (KMS) sebesar -11,5363 dengan probabilitas 0,0000. Maka t hitung > t tabel, pengambilan keputusannya adalah variabel kemiskinan merupakan penjelas yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dapat disimpulkan ada pengaruh negatif kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. t hitung variabel pertumbuhan ekonomi (GRWT) sebesar 2,2033 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukkan oleh probabilitas sebesar 0,0298. Berdasarkan kriteria t hitung > t tabel, maka disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan penjelas yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dapat disimpulkan ada pengaruh positif pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan t hitung variabel belanja modal (lnBMOD) sebesar 2,2632 dan signifikan pada taraf 5% yang ditunjukkan oleh probabilitas belanja modal sebesar 0,0257. Berdasarkan kri-

teria pengambilan keputusan maka t hitung > t tabel, yang berarti adalah variabel belanja modal merupakan penjelas yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Jadi dapat disimpulkan ada pengaruh positif belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat interkorelasi yang sempurna diantara beberapa variabel bebas yang digunakan dalam persamaan regresi. Dalam penelitian ini untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas dilihat dari perbandingan antara nilai R^2 regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan nilai R^2 regresi utama. Apabila nilai R^2 regresi parsial (*auxiliary regression*) lebih besar dibandingkan nilai R^2 regresi utama, maka dapat disimpulkan bahwa dalam persamaan tersebut terjadi multikolinieritas. Berikut disajikan tabel perbandingan R^2 regresi parsial (*auxiliary regression*) dengan R^2 regresi utama model *fixed effect*.

Tabel 7 Perbandingan R^2 Regresi *Auxiliary regression* Dengan R^2 Regresi Utama Model *Fixed Effect*

No.	Persamaan	R^2 Auxiliary Regression	R^2 Regresi Utama (<i>Fixed Effect</i>)
1	KMS, GRWT, lnBMOD	0,925625	0,980470
2	GRWT, KMS, lnBMOD	0,660516	0,980470
3	lnBMOD, KMS, GRWT	0,462063	0,980470

Berdasarkan Tabel 7 perbandingan antara nilai R^2 regresi *Auxiliary regression* dengan R^2 regresi utama model *fixed effect* dapat diketahui bahwa nilai keseluruhan persamaan antar variabel dependen lebih kecil dibandingkan dengan nilai dari regresi utama. Maka dapat diputuskan bahwa model tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Park dan Uji Glesjer. Hasil Uji Park dan Uji Glesjer selengkapnya terdapat pada lampiran 13. Berikut disajikan tabel resume hasil Uji Park dan Uji Glesjer sebagai penentu ada tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi.

Tabel 8 Resume Hasil Uji Glesjer dan Uji Park

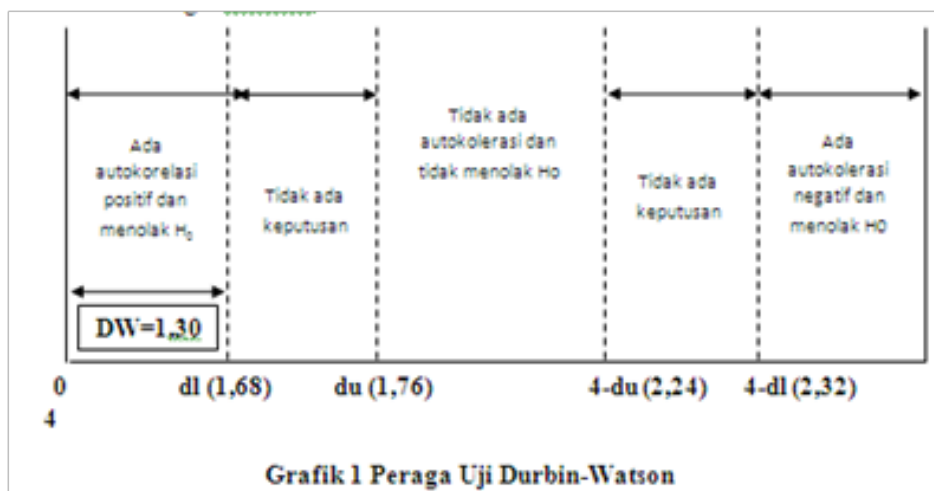
No	Variabel Independen	Uji Glesjer		Uji Park	
		t-Statistik	Probability	t-Statistik	Probability
1	C	-0,426521	0,6706	0,431481	0,6670
2	KMS	0,353306	0,7246	-0,037991	0,9698
3	GRWT	-0,047919	0,9619	-0,476906	0,6344
4	lnBMOD	0,835185	0,4056	-0,875221	0,3835

Berdasarkan Tabel 8 di atas diketahui bahwa variabel independen dan konstanta pada uji Glesjer dan uji Park untuk nilai probabilitasnya bersifat tidak signifikan dengan alpha 5% ($>0,05$). Sesuai dengan ketentuan uji Glesjer dan uji Park bahwa apabila nilai probabilitas di atas alpha 5%, model terbebas dari heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada

periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan tidak adanya autokorelasi dengan menggunakan (*Durbin Watson Test Bound*). Berdasarkan hasil penelitian model *fixed effect* pada Tabel 4.1 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,305490. Berdasarkan uji Durbin Watson diketahui nilai d_L dan d_U dengan jumlah variabel bebas ($k=3$) dan n 140 adalah: d_L (1,68), d_U (1,76), $4-d_U$ (2,24) dan $4-d_L$ (2,32). Nilai DW *Fixed Effect* sebesar 1,30, maka pengambilan keputusannya adalah terjadi autokorelasi positif dalam model. Hal ini didasari atas peraga uji Durbin Watson sebagai berikut :



Pada Grafik 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai DW *fixed effect* terletak pada daerah $dl > DW$ dimana daerah tersebut merupakan daerah dengan hasil autokorelasi positif sehingga dapat dikatakan bahwa model pada uji *Durbin-Watson* terjadi autokorelasi positif. Masalah terjadinya autokorelasi dalam data panel tidak perlu dikhawatirkan karena pada dasarnya data panel merupakan data gabungan dari *time series* dan *cross-section* sehingga data panel sebenarnya menjadi sebuah salah satu cara penyembuhan dari permasalahan uji asumsi klasik. Terlebih dalam model ini tidak menggunakan model OLS dimana autokorelasi sering terjadi, tetapi model dalam penelitian ini menggunakan LSDV dimana terdapat penambahan *Dummy Variabel* yang dapat menghindari terjadinya autokorelasi (Widarjono, 2009). Menurut Wibisono dalam Ajija, dkk (2011) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Gujarati dan Verbeek menyebutkan beberapa keunggulan dari data panel salah satunya adalah data panel dapat meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu, data panel mampu mengontrol heterogenitas individu sehingga dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku yang kompleks. Dengan keunggulan-keunggulan tersebut dapat menjadi dasar bahwa permasalahan autokorelasi yang terjadi pada data panel sudah dapat teratasi.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah tahun 2006-2009

UNDP membedakan tingkat IPM berdasarkan empat klasifikasi yakni: *low* (IPM kurang dari 50), *lower-medium* (IPM antara 50 dan 65,99), *upper-medium* (IPM antara 66 dan 79,99) dan *high* (IPM 80 ke atas). Berdasarkan Grafik 4.2 dapat diketahui bahwa rata-rata pencapaian IPM selama tahun 2006-2009 masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tidak ada yang masuk dalam klasifikasi *low*, juga tidak ada yang masuk dalam klasifikasi *lower-medium* dan *high*, tetapi keseluruhan rata-rata IPM masing-masing kabupaten/kota masuk ke dalam kategori *upper-medium* (antara 66 dan 79,99). Kondisi demikian menunjukkan peningkatan yang baik dalam pencapaian IPM di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Perkembangan IPM di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2009 seiring dengan indikator yang berkontribusi dalam pencapaian IPM yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat pula selama tahun 2006-2009. Perkembangan angka harapan hidup yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah mengalami

peningkatan yang cukup baik selama tahun 2006-2009. Pada tahun 2006 angka harapan hidup yang dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah sebesar 70,80 tahun, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2007 menjadi sebesar 70,90 tahun, hal demikian masih mengalami peningkatan kembali di tahun 2008 menjadi sebesar 71,10 tahun, hingga tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,25 tahun. Indikator angka harapan hidup yang semakin meningkat menunjukkan bahwa rata-rata banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang selama hidup menjadi lebih baik dan mengalami kualitas hidup yang lebih baik pula. Namun, keberhasilan ini tidak semata-mata melihat nilai dari keseluruhan di Jawa Tengah, tetapi di sisi lain terdapat kesenjangan yang cukup besar di masing-masing kabupaten/kota.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif sebesar 0,208192 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,208. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ginting, Charisma Kuriata S, dkk (2008) yang berjudul "Pembangunan Manusia di Indonesia". Dalam penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan koefisien kemiskinan sebesar -0,2410 dan signifikan pada tingkat kepercayaan 99,99%. Selain itu juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suradi (2007) yang berjudul "Pembangunan Manusia, Kemiskinan, dan Kesejahteraan" dimana hasil analisis deskriptifnya menyatakan bahwa kemiskinan berkaitan erat dan ikut menentukan proses pembangunan yang mengedepankan partisipasi masyarakat. Paradigma pembangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila jumlah penduduk miskin masih cukup signifikan. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan

pemenuhan kebutuhan dasar. Hasil penelitian-penelitian tersebut memperjelas bahwa semakin tinggi populasi penduduk miskin akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,153434 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,153. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan oleh Profesor Kuznet dimana salah satu karakteristik pertumbuhan ekonomi modern adalah tingginya pertumbuhan output perkapita (Todaro, 1997). Pertumbuhan output yang dimaksudkan adalah PDRB per kapita, tingginya pertumbuhan output menjadikan perubahan pola konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Artinya semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka akan semakin tinggi pertumbuhan output per kapita dan merubah pola konsumsi dalam hal ini tingkat daya beli masyarakat juga akan semakin tinggi. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif sebesar 0,274209 terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Hal ini menunjukkan bahwa apabila rasio belanja modal yang dikeluarkan mengalami peningkatan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah sebesar 0,274. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan ada pengaruh belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Jawa Tengah selama tahun 2006-2009.

Keterkaitan antara belanja modal dengan Indeks Pembangunan Manusia sangat erat dimana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (*national character building*) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan Indeks Pembangunan Manusia kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2006-2009 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,49. Rata-rata nilai IPM selama tahun 2006-2009 sebesar 71,32 dan masuk dalam kategori IPM menengah.

Analisis regresi dengan panel data pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006-2009 diperoleh hasil bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda negatif, dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,208. Signifikansi variabel kemiskinan terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada taraf 5%.

Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda positif, dapat disimpulkan bahwa apabila pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,153. Signifikansi variabel pertumbuhan ekonomi terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,029 signifikan pada taraf 5%.

Belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah berpengaruh positif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti semakin tinggi belanja modal yang dikeluarkan maka akan meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusia. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda positif, dapat disimpulkan bahwa apabila belanja modal yang dikeluarkan pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0,274. Signifikansi variabel belanja modal terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,025 signifikan pada taraf 5%. Hal ini sesuai dengan realisasi belanja modal yang dikeluarkan Pemprov Jawa Tengah selama periode tahun 2006-2009. Selama periode tersebut tercatat bahwa rata-rata peningkatan jumlah belanja modal sebesar Rp. 104.826.520.666. Jika dilihat dari peningkatan IPM, artinya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil merealisasikan belanja modal tersebut untuk kebutuhan barang publik dalam aspek pendidikan dan kesehatan guna menuju pada kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat dikemukakan beberapa saran antara lain bahwa Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dalam peningkatan IPM melalui pengentasan kemiskinan untuk periode tahun selanjutnya agar tetap mengacu pada program sebelumnya yaitu *pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth* namun dengan lebih menekankan pada penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih memadai. Selain itu, koordinasi diantara stakeholders maupun instansi pengampu secara berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota harus dioptimalkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih maupun terlewatnya sasaran penanggulangan kemiskinan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota disarankan dapat mempertahankan kemampuan merealisasikan pengalokasian anggaran untuk pengeluaran/belanja pemerintah di tahun-tahun selanjutnya terutama seperti sarana prasarana pendidikan, kesehatan maupun infrastruktur lainnya yang berkaitan dengan pelayanan publik sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pembangunan manusia yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajija, Shochrul R, dkk. 2011. *Cara Cerdas Menguasai EvIEWS*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik) : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-4*. Yogyakarta: BPFE.
- Baltagi, B.H. 2005. *Econometric Analysis of Panel Data, 3rd edition*. Chichester: John Wileyand Sons.
- Boediono. 2008. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE.
- BPS, BAPPENAS, UNDP. 2001. *Indonesia Human Development Report 2001*. Jakarta: BPS.
- BPS, BAPPENAS, UNDP. 2004. *Indonesia Human Development Report 2004*. Jakarta: BPS.
- BPS Jawa Tengah. 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2009. *Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009*. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah.
- BPS Jawa Tengah. 2009. *Jawa Tengah Dalam Angka 2009*. Jawa Tengah: BPS Jawa Tengah.
- Brata, A.G. 2002. "Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Indonesia". *Jurnal Ekonomi Pembangunan* vol. 07, no. 02, 113-122.
- Budiman, Arif. 1992. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: Gramedia.
- Cahyadi, Eka P. 2005. "Pelacakan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Bali)". *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Christy, F Andrea dan Priyo H Adi.2009."Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Kualitas Pembangunan Manusia".Dalam *Jurnal National Conference UKWMS*, 10 Oktober Surabaya:Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginting, Charisma K.S. 2008. "Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia". *Tesis*. Sekolah Pasca Sarjana Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ginting, Charisma K.S.,Irsad Lubis, dan Kasyful Mahalli. 2008. "Pembangunan Manusia di Indonesia". *Jurnal Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, vol. 04, no. 01, Wahana Hijau.
- Gujarati, D.N. 2004. *Basic Econometrics, 4th edition*. New York: The McGraw-Hill Companies.
- Jhingan, M.L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

- Kintamani, Ida. 2008. "Analisis Pembangunan Manusia Indonesia". Dalam *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, No. 072. idakintamani@yahoo.com.
- Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mailendra, Fitra. 2009. "Analisi Dampak Pemekaran Wilayah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat". *Skripsi*. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Nazir, Moh. 1993. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Eko P. 2009. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.
- Robiyanto, Febra., Wyati S, dan Mamik, I. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Semarang: Studi Nusa.
- Stalker, Peter. 2008. *Millenium Development Goals*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Sudjana, 2003. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito
- Suganda, T., Kodrat W, dan Dede, M. 2008. *Bersama Menata Perubahan*. Jakarta: BAPPENAS.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Bima Grafika.
- Suradi. 2007. "Pembangunan Manusia, Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, vol 12, no 03. 1-11.
- Todaro, M.P. 1998. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- UNDP. 1990. *Human Development Report 1990*. New York: Oxford University Press.
- _____. 1995. *Human Development Report 1995*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2001. *Human Development Report 2001*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2003. *Human Development Report 2003*. New York: Oxford University Press.
- _____. 2004. *Human Development Report 2004*. New York: Oxford University Press.
- Widarjono, Agus. 2009. *Ekonometrika (Pengantar dan Aplikasinya)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Winarno, Wing W. 2009. *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan EViews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.